

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Tinjauan Sikap Perilaku Pemilih

##### a. Pengertian Sikap

Secara umum sikap (*attitude*) adalah perasaan, pikiran dan kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen mengenal aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya.

Menurut Berkowitz dalam Saiffudin Azwar (2013:4) “sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut.”

Menurut Gerungan dalam Mukhroni (2014: 17) mengemukakan ciri-ciri sikap sebagai berikut :

1. *Attitude* tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajarinya sepanjang perkembangan orang itu, dalam hubungannya dengan objeknya.
2. *Attitude* dapat berubah-ubah, karena itu attitude dapat dipelajari orang.
3. *Attitude* itu tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan tertentu terhadap objek. Dengan kata lain, attitude itu terbentuk, dipelajari, atau berubah senantiasa berkenaan

dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.

4. *Attitude* dapat berkenaan dengan suatu objek saja, juga berkenaan dengan sederet objek yang serupa.
5. *Attitude* mempunyai segi-segi motivasi dan perasaan. Sifat inilah yang membedakan *attitude* dari kecakapan-kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa sikap tidak dibawa sejak lahir, namun dapat dibentuk atau dipelajari. Sikap itu tidak tetap, melainkan berubah-ubah, karena sikap dibentuk oleh komponen-komponen. Menurut Azwar (2013: 23) sikap terdiri dari 3 komponen yaitu pemikiran (kognitif), perasaan (afektif), dan predisposisi tindakan (konatif) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.

- a. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau yang kontroversial.
- b. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu
- c. Komponen perilaku atau komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya.

Sedangkan menurut Secord Backman dalam Azwar Saiffudin (2013:

- 5) “mendefinisikan sikap sebagai keteraturan dalam hal perasaan (afektif), pemikiran (kognitif), dan predisposisi tindakan (konatif) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.”

Dari definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa secara garis besar sikap terdiri dari komponen ide yang umumnya berkaitan dengan pembicaraan perilaku orang-orang dengan keadaan-keadaan tertentu yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya.

#### **b. Pengertian Perilaku Pemilih**

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum teori tentang perilaku memilih dikategorikan kedalam dua kubu yaitu ; Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan (Fadillah Putra, dalam Yongki Sapito (2012: 10). Mazhab Colombia menekankan pada faktor sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan di pemilu. Model ini melihat masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga yang teratas. Penganut pendekatan ini percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur, jenis kelamin dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Oleh karena itu preferensi pilihan terhadap suatu partai politik “merupakan suatu produk dari karakteristik sosial individu yang bersangkutan” (Gaffar, Affan, 1992 : 43 ).

Liddle dan Mujani dalam Alie Marzuki (2013: 73) mengenai perilaku pemilih , menyatakan bahwa faktor yang paling utama bagi pemilih pada pemilu legislatif dan presiden RI tahun 2004 adalah keterikatan pemilih pada individu pemimpin partai.

Newman (1999)membagi pemilih berdasarkan perilaku dalam empat segmen, yaitu :

- a. Pemilih rasional, dalam pemilih yang memfokuskan perhatian pada faktor isu dalam kebijakan kontestan dalam menentukan pilihan
- b. Pemilih emosional, adalah pemilih yang dipengaruhi oleh perasaan-perasaan tertentu yang ditentukan oleh faktor personalitas kandidat dalam menentukan pilihanya
- c. Pemilih sosial, adalah pemilih yang mensosialisasikan kontestan pemilih dengan kelompok-kelompok sosial tertentu dalam menentukan pilihanya
- d. Pemilih situasional, adalah pemilih yang dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional atau kondisi tertentu dalam menentukan pilihannya

Sedangkan Mahendara (2005) “mengatakan perilaku memilih adalah tindakan ikut serta dalam memilih orang, partai politik, atau isu publik tertentu”.

“Secara teoritik ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap seseorang dalam menjatuhkan pilihannya kepada calon tertentu. Menurut Adman Nursal bahwa kualitas pemimpin merupakan “salah satu faktor yang berpengaruh dalam keputusan memilih” (2010: 4)

Faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih menurut Malin dalam Kushartono (2010: 6) diantaranya:

1). Identitas partai, dimana semakin solid dan mapan suatu partai politik maka akan memperoleh dukungan yang mantap dari para pendukungnya begitu pula sebaliknya, 2). Kemampuan partai dalam menjual isu kampanye. Partai *status quo* biasanya menjual isu-isu kemapanan dan keberhasilan yang telah mereka raih. Partai-partai politik baru biasanya menjual isu-isu “menarik” dan partai politik tersebut biasanya dianggap “bersih” terutama dari nuansa *money politic*, 3). Penampilan kandidat, dimana performa kandidat sangat menentukan keberhasilan kandidat.

Dalam kajian perilaku pemilih hanya ada dua konsep utama, yaitu; perilaku memilih (*voting behavior*) dan perilaku tidak memilih (*non voting behavior*). “David Moon mengatakan ada dua pendekatan teoritik utama dalam menjelaskan perilaku *non-voting* yaitu: *pertama*, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu; dan *kedua*, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih” (dalam Hasanuddin M. Saleh:2007).

Menurut Jack Plano voting behavior atau perilaku memilih adalah: “Salah satu bentuk perilaku politik yang terbuka. (2013:1)” Sedangkan menurut Haryanto (2013:1)”, Voting adalah: “Kegiatan

warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan di daftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih adalah bentuk kegiatan seorang individu maupun kelompok dalam memberikan suaranya dalam berbagai bentuk kegiatan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pemberian suara kepada salah satu kontestan merupakan suatu kepercayaan untuk membawa aspirasi pribadi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kepercayaan yang diberikan, juga karena adanya kesesuaian nilai yang dimiliki arah tempat memberikan suara. Nilai yang di maksud di sini adalah preferensi yang dimiliki organisasi terhadap tujuan tertentu atau cara tertentu melaksanakan sesuatu. Jadi kepercayaan pemberi suara akan ada, jika seseorang telah memahami makna nilai yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan. Perilaku memilih atau voting behavior dalam pemilu adalah respons psikologis dan emosional yang diwujudkan dalam bentuk tindakan politik mendukung suatu partai politik atau kandidat dengan cara mencoblos surat suara.

### **c. Tipe Pemberian Suara**

Pendekatan perilaku dalam studi politik telah melahirkan karya tentang tipe dan perilaku pemilih yang merupakan individu-individu yang memiliki daya seleksi. Selanjutnya Nimmo Dan dalam Arifin

Anwar (2014: 82-83) mengemukakan empat tipe dalam pemberian suara dalam pemilihan umum, yaitu: (1) tipe rasional; (2) tipe reaktif; (3) tipe responsif; dan (4) tipe aktif. Penjelasan keempat tipe tersebut disajikan berdasarkan pemaparan Nimmo (*ibid*) sebagai berikut.

1. *Tipe rasional* adalah pemberi suara yang rasional, yang sesungguhnya merupakan aksional diri, yaitu sikap yang intrinsik pada setiap karakter personal pemberi suara yang turut memutuskan pemberian suara kepada kebanyakan warga negara. Orang yang rasional: (1) selalu dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif; (2) memilih alternatif-alternatif secara sadar; (3) menyusun beberapa opsi dengan cara transitif; (4) selalu memilih opsi yang peringkat preferensinya paling tinggi; dan (5) selalu mengambil putusan yang sama bilamana dihadapkan kepada opsi-opsi yang sama.

Pemberi suara rasional berminat secara aktif terhadap politik rajin berdiskusi dan mencari informasi politik, serta bertindak berdasarkan prinsip yang tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan umum. Demikian juga pemberi suara rasional mampu bertindak secara konsisten dalam menghadapi tekanan dan kekuatan politik.

2. *Tipe reaktif* adalah pemberi suara yang memiliki keterkaitan emosional dengan partai politik. Ikatan emosional kepada partai sebagai identifikasi partai, yakni sebagai sumber utama aksi-aksi

pemberi suara yang reaktif. Identifikasi dengan partai meningkatkan citra yang lebih menguntungkan tentang catatan dan pengalamannya, kemampuan dan atribut personalnya.

Dengan demikian, identifikasi dengan partai meningkatkan tabir perseptual sehingga individu dapat melihat keuntungan bagi orientasi kepartaiannya. Semakin kuat ikatan partai itu, semakin dibesar-besarkan proses seleksi dan distorsi persepsinya.

3. *Tipe responsif* adalah pemberi suara yang mudah berubah dengan mengikuti waktu, peristiwa politik, dan kondisi sesaat. Meskipun memiliki kesetiaan kepada partai, tetapi afiliasi itu ternyata tidak mempengaruhi perilakunya dalam pemberian suara. Hubungan dengan partai politik lebih rasional ketimbang emosional.

Pemberi suara yang responsif lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor jangka pendek, terutama kepentingan dalam pemilihan umum tertentu, dibanding oleh kesetiaan jangka panjang kepada kelompok atau kepada partai politik. Jadi tipe responsif bersifat situasional.

4. *Tipe aktif*, adalah pemberi suara yang terlibat aktif dalam menafsirkan personalitas, peristiwa, isu, dan partai politik, dengan menetapkan dan menyusun maupun menerima, serangkaian pilihan yang diberikan. Para pemberi suara merumuskan *citra politik* tentang apa yang diperhitungkan oleh mereka dengan berbagai varian.

Arifin Anwar (2014: 84) menemukan di lapangan adanya satu tipe lagi, yaitu *tipe transaksional*, yaitu individu-individu yang mengambil keputusan dari sejumlah opsi, berdasarkan “transaksi”, berupa “hadiah” atau “fasilitas”. Meskipun simpatisan atau anggota dalam suatu partai, ia dapat memilih kandidat dari partai lain, berdasarkan *transaksi* yang dikenal sebagai aplikasi dari “politik uang” (*money politics*) yang berlangsung dalam “pasar gelap” (*black market*) politik. Tipe ini ternyata jumlahnya sangat banyak di Indonesia, bukan saja bisa terjadi dikalangan elit, tetapi juga dikalangan orang banyak terutama dari kalangan orang-orang miskin dan kurang pendidikan, seperti para penganggur, preman, pengamen dan banyak lagi.

Secara garis besar tipe perilaku pemilih dalam pemilihan umum dilihat dari karakteristik sikap masyarakat dimana menjadi suatu opsi pilihan dalam menentukan pilihannya berdasarkan pengaruh dari dalam maupun luar yang dapat menjadi penentu pilihannya.

#### **d. Pendekatan Perilaku Pemilih**

Menurut J Kristiadi, seperti yang dikutip oleh Yongki Sapito, (2012: 11) secara umum terdapat tiga teori tentang perilaku memilih (Voting Behavior) yang dikelompokkan ke dalam tiga mazhab besar:

## 1. Mazhab Sosiologis

Mazhab sosiologis menjelaskan karakteristik dan pengelompokan sosial dan merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku politik dalam pemilihan suara. Pada hakikatnya adalah pengalaman kelompok, mazhab sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial seperti usia, jenis kelamin, agama, latar belakang, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku politik.

Mengenai mazhab sosiologis, Affan Ghaffar, seperti dikutip oleh Yongki Sapito (2012: 12), menyatakan bahwa :

Mazhab sosiologis atau mazhab colombia, memandang bahwa masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang bersifat hierarkis atau vertikal, yang cenderung didasarkan pada kedudukan mereka dalam masyarakat, sehingga dengan demikian masyarakat sudah terpola dengan demikian rupa, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kelompok-kelompok tersebut kemudian akan membentuk persepsi sikap, keyakinan, dan sikap politik dari masing-masing individu.

Sedangkan menurut Asfar Muhammad dalam Yongki Sapito (2003: 12) Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam

menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan seperti umur (tua, muda), jenis kelamin, agama, dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam bentuk perilaku pemilih.

Dari pengertian mazhab sosiologis di atas dapat dipahami bahwa karakteristik lingkungan sosial seperti keluarga, pekerjaan, dan teman dekat yang di dalamnya terjadi interaksi dapat mempengaruhi perilaku politik dalam memberikan suara.

## **2. Mazhab Psikologis**

Mazhab Michigan menggarisbawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini didasarkan pada konsep sikap dan sosialisasi politik (kampanye) sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politik, sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung sejak lama bahkan bisa jadi sejak seorang calon pemilih telah menerima pengaruh politik dari orang tuanya, baik dari komunikasi langsung maupun pandangan politik yang dideskripsikan orang tuanya. Sikap tersebut menjadi lebih mantap ketika menghadapi pengaruh berbagai kelompok acuan seperti, kelompok pekerjaan, kelompok pengajian dan kelompok sebagainya. Proses panjang sosialisasi itu kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Ikatan seperti inilah yang disebut dengan identifikasi partai.

Affan Ghaffar seperti yang dikutip Yongki Sapito, (2012: 15) mengatakan bahwa: Mazhab Michigan's memandang bahwa masyarakat dalam menentukan pilihannya pada suatu proses pemilihan umum lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sendiri yang semuanya merupakan akibat dari hasil proses sosialisasi politik.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil pengertian bahwa proses sosialisasi politik yang di alami masyarakat menjadi pandangan bahwa, suatu sosialisasi apabila berjalan lancar dan dapat menyentuh hati masyarakat maka dalam proses politik selanjutnya akan diterima dengan hasil yang sesuai.

Pendekatan ini menggunakan dan menggunakan konsep psikologis, terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan perilaku memilih. Pendekatan psikologis menganggap sikap sebagai variabel sentral dalam menjelaskan perilaku politik. Hal ini disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri, dan menurut Greenstein ada tiga fungsi yang mendasarinya (Asfar Muhammad, dalam Yongki Sapito, (2012: 15)

*Pertama*, sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya pemuatan terhadap suatu objek diberikan berdasarkan motifasi, minat dan kepentingan, orang tersebut. *Kedua*, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri.

Artinya seseorang bersikap tertentu sesuai dengan kepentingan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan. *Ketiga*, sikap merupakan upaya yang mungkin terwujud mekanisme atau pertahanan (*defence mekanisen*) dan eksternalisasi suatu proyeksi, rasionalisme idealisme, dan identifikasi.

Berdasarkan pemaparan di atas maka indikator Mazhab Psikologi adalah sebagai berikut :

a. Identifikasi partai

Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterkaitan psikologis pemilih terhadap partai tertentu. Konkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain. Selain itu masih ada keterkaitan antara pemilih : Terhadap keluarga terutama orang tua, dalam hal ini partai yang selalu dijunjung oleh keluarga maka dia unjung pula. Artinya pemilih melihat orang yang dipilih dengan mengidentifikasi dari partai yang di ikuti oleh orang tuanya.

b. Ketokohan

Kandidat yang dirasakan cukup dekat dengan pasti dia akan memilih kandidat tersebut atau seorang tokoh yang sangat disegani pasti akan menjadi pedoman baginya untuk memilih. Tokoh dalam hal ini yaitu pemimpin-pemimpin partai atau tokoh-tokoh nasional

yang relatif dikenal secara nasional. Konsep ini relatif independen untuk menarik massa untuk memilih partai dimana seorang calon tersebut merupakan tokoh partai tertentu. Masyarakat memilih partai tidak hanya karena daya tarik itu sendiri, tetapi lebih karena adanya tokoh-tokoh pemimpin partai.

### **3. Mazhab Rational Choice**

Pendekatan rasional berkaitan dengan perubahan pola pikir masyarakat, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Orientasi isu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, dan politik tertentu yang kontekstual dengan pemilihan umum bersangkutan terutama peristiwa dramatis. Sementara itu pendekatan rasional sebagai kandidat bisa didasarkan sebagai kedudukan informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang seperti organisasi, kesenian, olahraga, dan politik.

Pendekatan rasional mengantarkan pada kesimpulan, bahwa para pemilih benar-benar rasional, para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran partai. Berdasarkan tindakan komunikasi, Nimmo (2012: 18) menggolongkan pemilih ini sebagai pemberi suara yang rasional. Pemilih rasional itu mewakili motivasi, prinsip, pengetahuan, dan pendapat informasi yang cukup, tindakan mereka bukanlah faktor kebetulan atau kebiasaan,

bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan umum menurut pikiran dan pertimbangan logis.

Sementara Nimmo dalam Yongki Sapito (2012:18) ciri-ciri pemberian suara yang rasional meliputi 5 hal :

1. Dapat mengambil keputusan jika dihadapkan pada alternatif
2. Dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja atau lebih rendah dibandingkan dengan alternatif lain
3. Menyusun alternatif dengan cara transitif, jika a lebih disukai daripada b dan b lebih baik daripada c, maka a lebih disukai daripada c
4. Memilih alternatif yang tingkat prefensinya lebih tinggi
5. Selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif yang sama.

Sangat jarang sekali pemilih rasional memenuhi syarat-syarat di atas, hal ini disebabkan karena tidak ada insentif yang memadai untuk mencari informasi yang maksimal sebagai input untuk mengambil keputusan, jika pemilih memang menyerap informasi tetapi mereka tidak mencari dan mengelola informasi dengan aktif. Mereka mendapatkan informasi sebagai produk sampingan dan berbagai aktivitas sehari-hari, mereka tidak memiliki informasi yang cukup dan mereka juga tidak memiliki waktu untuk memeriksa akurasi informasi yang diserapnya. Situasi seperti inilah yang dipostulatkan oleh Popkin sebagai *hukum Low Information Rationality*

(*rasionalitas berdasarkan informasi terbatas*) atau *Get Rationality* (logika perut).

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diambil indikator dari Mazhab Rational Choice dalam Yongki Sapito (2012: 19) :

a. Orientasi kandidat

Kandidat secara faktual adalah bagian penting dari proses pelaksanaan pemilu. Melihat dari kualitas, kapasitas, integritas, dan akuntabilitas kandidat yang tampil pemilu akan sangat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Selain itu secara rasional masyarakat juga menginginkan calon yang memiliki program-program yang ditawarkan demi kesejahteraan masyarakat.

b. Media

Peran media sangat berpengaruh bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Program-program yang ditawarkan baik melalui media televisi, koran, ataupun radio dapat dengan mudah diakses oleh pemilih. Dengan adanya iklan-iklan partai yang terus menerus dapat mempengaruhi serta memberikan gambaran bagi pemilih siapakah calon yang layak mereka pilih.

**e. Perspektif dan Orientasi Pemberi suara**

Faktor-faktor yang membuat individu pemberi suara menyaring semua pengaruh dari luar itu antara lain, keyakinan politik atau ideologi, persepsi politik, motifasi politik, sikap politik, dan dorongan politik. Meskipun demikian semua faktor khalayak itu

dalam menentukan pilihannya dapat dirangkum dalam dua konsep yaitu, perspektif dan persepsi.

Perspektif menurut Fisher dalam Arifin (2014: 86) adalah sudut pandang bagi individu yang menjadi kerangka acuan dalam menilai, menanggapi dan menindaki sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Sedangkan persepsi Menurut Rakhmat (2014: 86) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Justru itu, perspektif dan persepsi sangat ditentukan oleh faktor personal para pemberi suara.

Dan Nimmo dalam Arifin (2014: 86) menyebutkan tiga hal sangat penting dalam mempersepsi komunikasi tentang isu dan kandidat yang diterima selama kampanye yaitu atribut, perspektif, dan persepsi pemberi suara.

*Atribut sosial dan demografi* menerangkan juga tentang perspektif pemberi suara terutama menyangkut *citra diri politik*. Citra diri politik menurut Nimmo (2014: 86) “mencangkup: (1) citra diri partisan, (2) citra diri kelas, (3) citra diri ideologis, dan (4) citra diri jabatan yang ideal”.

*Citra diri partisan*, yaitu melakukan pemberian suara tanpa terpengaruh oleh isu, kandidat, dan peristiwa. Sebagai partisan partai, ia memberikan suaranya kepada partai tersebut. Sedang *citra diri kelas*, yaitu pemberi suara yang mengacu kepada kelas sosial tempat

mereka mengidentifikasi diri dan menganggap dirinya sebagai anggotanya, seperti kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Selanjutnya *citra diri ideologi* menunjukkan bahwa para pemilih memberikan suaranya kepada partai atau kandidat yang sesuai dengan ideologi politiknya (*ibid*).

Pemberian suara akan menjatuhkan pilihannya kepada kandidat sesuai dengan *citra diri jabatan ideal* baginya. Pada umumnya pemilih mencari sifat abstrak seperti: kedewasaan, kejujuran, kecerdasan kesungguhan, kegiatan dan energi. Hal itu merupakan gabungan dari sifat *kepahlawanan politik*. Dengan kata lain, pemilih akan mencari pahlawan politik untuk dipilih menduduki jabatan tertentu seperti: presiden, gubernur, dan anggota parlemen (*ibid*)

Persepsi khalayak terhadap partai dan kandidat yang akan dipilih, menurut Nimmo (2014: 87) ditentukan juga oleh *citra partai*, *citra kandidat* dan *isu politik* dalam kampanye. *Citra partai* adalah apa yang dipercaya dan diharapkan tentang apa yang dilakukan oleh partai. Setiap orang dapat saja mengidentifikasi dirinya dengan partai tertentu, meskipun ia tidak menyukai apa yang dilakukan oleh partai itu. Dengan kata lain, citra partai secara efektif akan memainkan peranan sebagai penengah yang menerjemahkan apa yang berlangsung dalam lingkungan politik ke dalam makna para pemberi suara dalam pemilu (*ibid*).

Teori tentang perilaku memilih yang dikemukakan oleh Richard R. Lau dan David P. Redlawsk dalam Yongki Sapito (2012: 20) dalam bukunya “How Voter Decide”. Dalam bukunya mereka mengenalkan 5 faktor penentu pilihan politik yaitu faktor *Affect referral*, *Endorsement*, *Familiarity*, *Habit*, *Viability*.

### **1. *Affect Referral***

Pengaruh rujukan di sini yang dimaksud adalah jika pemilihan umum diikuti oleh beberapa kandidat maka pemilih akan cenderung memilih seorang calon yang cukup *familiar* bagi mereka dengan menggunakan rujukan, bahwa kandidat yang sudah pernah mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya walaupun jenis pemilihannya berbeda, apakah itu pemilihan legislatif atau eksekutif, maka kandidat calon itulah yang akan mereka pilih.

Jadi, pemilih memiliki *memory* dan sudah mengenal salah satu kandidat melalui pemilihan-pemilihan umum sebelumnya hal inilah yang menjadi rujukan pemilih untuk memilih salah satu kandidat calon.

### **2. *Endorsement***

Pendekatan endorsement ini sedikit mirip dengan pendekatan sosiologis yang di kemukakan Kristiadi, akan tetapi hal ini sangat berbeda, Kristiadi J membagi pendekatan sosiologis menjadi dua aspek yaitu karakteristik sosial dan kelompok sosial, sedangkan

Richard R. Law dan David P. Redalawsk hanya melihat dari aspek kelompok.

Mereka berpendapat bahwa seseorang memilih kandidat calon karena adanya saran atau masukan dari orang-orang terdekat baik itu keluarga ataupun teman dekat, kemudian juga bisa dipengaruhi oleh kepercayaan seorang pemilih terhadap salah satu elit politik yang mendukung salah satu kandidat calon.

### **3. *Familiarity***

Jika pemilih dihadapkan oleh beberapa kandidat calon maka pemilih akan lebih cenderung memilih calon yang sudah tidak asing lagi bagi mereka, jadi pemilih akan memilih kandidat calon yang sudah mereka kenal maka ia akan memilih kandidat calon yang ia kenal walaupun kandidat calon tersebut sama atau sedikit lebih unggul dari calon-calon lainnya

### **4. *Habit***

Pemilih melakukan pemilihan berdasarkan kebiasaannya. Kebiasaan disini adalah kebiasaan memilih partai tertentu jadi pemilih tersebut sudah biasa memilih partai tertentu di pemilihan-pemilihan sebelumnya. Kebiasaan ini biasa berasal dari kebiasaan diri sendiri atau kebiasaan yang ditularkan oleh keluarga.

## 5. *Viability*

Walaupun pelaksanaan pemilihan belum dilaksanakan akan tetapi biasanya masyarakat telah memiliki pendapat atau pandangan kandidat mana yang memiliki peluang paling besar untuk menang, hal inilah yang dimaksud oleh faktor *Viability*, pemilih bisa menilai calon yang berpeluang menang bisa dari berbagai sudut pandang misalkan karena calon memiliki kekayaan yang banyak, jaringan calon yang luas, karena pekerjaan.

## 2. Tinjauan Tentang Kapabilitas Partai Politik

### a. Pengertian Kapabilitas

Kapabilitas merupakan keefektifan kemampuan seseorang dalam melakukan segala macam pekerjaan. Yang artinya kemampuan merupakan dasar dari seseorang tersebut melakukan sebuah pekerjaan secara efektif dan tentunya efisien. Kapabilitas merupakan sebuah kapasitas yang dimiliki oleh setiap individu untuk melaksanakan tugasnya.

Arti kapabilitas atau kapabel adalah mampu; cakap; pandai; sanggup atau menurut definisi yang dikemukakan oleh Baker dan Sinkula (2005), "*Capabilities are bundles of more specific skills, procedures, and processes that can leverage resources into competitive advantage.*". (Kapabilitas adalah kumpulan keterampilan yang lebih spesifik, prosedur, dan proses yang dapat memanfaatkan sumber daya ke keunggulan kompetitif). Dengan demikian, kapabilitas adalah

kemampuan atau kesanggupan yang dapat membuat sumber daya menjadi keunggulan bersaing.

Firmanzah dalam Alie Marzuki (2013: 72-71) mengungkapkan kemampuan atau kapabilitas orang atau kandidat merupakan faktor yang menentukan bagi masyarakat dalam memilih partai politik atau kandidat. Hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh Fuholim dalam Marzuki Alie (2013: 73) bahwa *candidate credibility* merupakan salah satu faktor penting dalam *political campaign*. Selanjutnya Krap dalam Alie Marzuki (2013: 73) berpendapat bahwa peran seseorang pemimpin dan anggota dalam partai politik sangat penting, karena dapat memberikan gambaran dan petunjuk singkat tentang kualitas partainya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kapabilitas partai politik merupakan suatu kemampuan partai politik dalam mengelola suatu organisasi politik yang sudah terorganisir terhadap program-program kerja seperti sosialisasi jika suatu organisasi dalam mengelola partai dapat berjalan dengan baik, maka dapat memberikan gambaran dan petunjuk singkat tentang kualitas partainya.

## **b. Pengertian Partai Politik**

UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik yang berbunyi,

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Partai politik diartikan secara loggar oleh Giovanni Sartori dalam Arifin (2014: 189) yaitu “kelompok kepentingan apa saja yang ikut serta dalam pemilihan umum dan mampu menempatkan orang-orangnya dalam jabatan-jabatan politik. “Sejalan dengan itu Ichlasul Amal dalam Arifin (2014: 190) menulis bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.”

Sebuah partai politik yang memiliki citra politik yang baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap warga negara atau publik sebagai khalayak komunikasi politik, agar memberikan suaranya dalam pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil Arifin (2014: 191)

“Partai politik sebagai suatu golongan rakyat yang tersusun yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan penggunaan kekuasaan hak memberikan suara bertujuan untuk mengawasi pemerintah dan melaksanakan politik untuk mereka," Salton dalam Busroh, Daud (2008: 155).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan suatu perkumpulan masyarakat yang terorganisir yang melakukan kinerja politik, secara teratur berdasarkan program kerja untuk merebut kekuasaan secara berkala dalam pemilu.

### **1. Syarat-Syarat Pendirian Partai Politik**

Untuk dapat mendirikan partai Politik baru maka perlu untuk tahu akan syarat yang harus dipenuhi sesuai pasal 2 UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu :

- 1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
  - (1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
  - (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
- 2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- 3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.

Pasal 3 UU no 2 tahun 2011 berbunyi

- 1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
- 2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
  - a. akta notaris pendirian Partai Politik;
  - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
  - c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan rekening atas nama Partai Politik

Tujuan partai politik menurut UU No.2 Tahun 2008, memiliki 7 unsur yakni:

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
5. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik pemerintahan
6. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
7. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Klasifikasi Partai Politik (*ibid*: 196)

Dari beberapa pengamatan terdapat partai partai yang ada, partai-partai tersebut dapat diklasifikasikan menurut :

- 1) Jumlah dan fungsi anggotanya
- 2) Sifat dan orientasi tersebut

Menurut jumlah dan fungsi anggotanya dikenal :

- 1) Partai massa, yaitu partai yang selalu mendasarkan kekuatannya pada jumlah anggotanya.
- 2) Partai kader, partai yang mementingkan loyalitas dan disiplin anggotanya. Tidak perlu jumlahnya banyak yang kalau perlu loyal dan disiplin.

Undang- Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2002 tentang pembentukan partai politik Pasal 2 berbunyi;

- 1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas dengan akta notaris.
- 2) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan tingkat nasional.
- 3) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan syarat:
  - a. memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua lima puluh persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - c. memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang dan tanda gambar partai politik lain; dan
  - d. memiliki kantor tetap.

### 3. Citra Kandidat

Citra kandidat (*candidate personality*) dikemukakan Nursal dalam Putra Adhie (2009 : 31) yaitu mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat.

Citra kandidat atau seseorang tentang politik menurut Nimmo Dan dalam Arifin (2014: 23-24) terjalin melalui pikiran, Perasaan, dan kesucian subyektif akan memberi kepuasan baginya dan memiliki paling sedikit tiga kegunaan. *Pertama*, memberi suara pemahaman tentang peristiwa politik tertentu. *Kedua*, kesukaan atau ketidaksukaan umum kepada citra seseorang tentang politik menyajikan dasar untuk menilai objek politik. *Ketiga*, citra diri seseorang dalam cara menghubungkan diri dengan orang lain.

Citra politik seseorang atau kandidat akan membantu dalam pemahaman penilaian, dan mengidentifikasi peristiwa, gagasan, tujuan, atau pemimpin politik Arifin (2014: 24). Citra politik yang melekat dibenak individu-individu itu akan tersimpan dalam kesadaran kolektif rakyat, sehingga semua perilaku partai politik terutama yang disiarkan berulang-ulang oleh media massa atau media sosial tidak akan terhapus begitu saja. Demikian juga rakyat bukan saja merupakan khalayak dalam komunikasi politik, melainkan juga sebagai komunikator dalam model komunikasi timbal balik, sehingga dapat memberikan penilaian sebagai pesan kepada setiap partai dan setiap politikus Arifin (2014: 25)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa citra kandidat merupakan strategi pencitraan melalui komunikasi politik dalam menghubungkan citra diri seseorang atau kandidat melalui rakyat yang menimbulkan kesan, persepsi yang relatif permanen terhadap politikus selaku komunikator politik.

#### **a. Pengertian Citra**

Firmazah (2010: 230-231) mengemukakan bahwa *image* (citra) dapat menguat atau melemah, luntur, dan hilang, dalam sistem kognitif masyarakat. Selain itu *image* (citra) terkait juga dengan identitas, sehingga image dan identitas tidak dapat dipisahkan.

Citra biasa juga diartikan sebagai cara anggota organisasi melihat kesan atau *persepsi* yang ada dibenak orang. Hal itu sangat berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap pesan yang menyentuhnya dan merangsangnya. Citra yang melekat dan tersimpan dibenak seseorang itu tidak selamanya identik dengan kenyataan yang sesungguhnya. Demikian juga citra dapat merefleksikan hal yang tidak nyata atau imajinasi yang mungkin tidak sama dengan realitas empiris, sehingga citra adalah dunia persepsi kita Walter Lippman (1969) menyebutnya *picture in our head* Arifin (2014: 19)

Citra memiliki empat bentuk. Baudrillard dalam Arifin (2014: 19) menyebutkan keempat bentuk itu, ialah: (1) representasi dimana citra merupakan cermin suatu realitas; (2) ideologi di mana citra menyembunyikan dan memberikan gambaran yang salah akan realitas; (3) citra menyembunyikan bahwa tidak ada realitas; dan (4) citra tidak memiliki sama sekali hubungan dengan realitas apapun (*ibid*).

Pentingnya aspek citra terhadap keputusan pemilih dalam memutuskan. Partai politik yang memiliki citra buruk berdasarkan persepsi pemilih akan tidak dipilih olehnya. Fuholin dalam Marzuki Alie (2013: 77) mengungkapkan bahwa *An essential part of the campaign strategy is the image or the target profile of the candidate. Profiling is the sustained building of desired associations about the candidate in the minds of target group, i.e. the voters.* (Sebuah bagian penting dari strategi kampanye adalah gambar atau profil target kandidat. Profiling adalah bangunan berkelanjutan asosiasi yang diinginkan tentang calon dalam pikiran kelompok sasaran, yaitu pemilih). Pernyataan tersebut menekankan bahwa terdapat keterkaitan antara partai politik dengan profil kandidat. Kandidat yang memiliki citra buruk akan membuat partainya juga dinilai buruk. Demikian sebaliknya.

Kemudian Firmanzah (2007: 230) juga mengatakan bahwa *image* atau citra politik didefinisikan sebagai konstruksi atas representasi dan persepsi masyarakat suatu partai politik atau individu mengenai semua hal yang terkait dengan aktivitas politiknya.

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa citra merupakan sebuah identitas partai politik yang dapat membedakan suatu partai dengan partai lainnya berdasarkan kompetensi partai dalam menggunakan strategi.

#### 4. Sistem Pemilu

Pemilihan umum merupakan peryaratan minimum negara demokrasi. Suatu sistem demokrasi dapat di katakan sudah berjalan ketika terpenuhi beberapa karakteristik, seperti pemilihan umum yang fair dan periodik, pertanggungjawaban negara di depan rakyat, dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi (Beetham, 1994).

Budiardjo (2009: 477), perkembangan sistem pemilihan umum di Indonesia dapat disimpulkan, keputusan untuk tetap menggunakan sistem proporsional pada tahun 1967 adalah keputusan yang tepat karena tidak ada distorsi atau kesenjangan antara perolehan suara nasional dengan jumlah kursi dalam DPR. Yang kedua ketentuan didalam UUD 1945 bahwa DPR dan presiden tidak dapat saling menjatuhkan merupakan keuntungan, karena tidak ada lagi gejala sering terjadinya pergantian kabinet seperti zaman demokrasi parlementer.

Nohlen (2008: 3) mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam dua pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah “segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih.” Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah “cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.”

Definisi lain diberikan oleh Matias Iaryczower and Andrea Mattozzi dari California Institute of Technology (2008: 3). Menurut mereka, yang dimaksud dengan sistem pemilihan umum adalah "... menerjemahkan suara yang diberikan saat Pemilu menjadi sejumlah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai di dewan legislatif nasional. Dengan memastikan bagaimana pilihan pemilih terpetakan secara baik dalam tiap kebijakan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilihan umum sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan."

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pemilu merupakan suatu struktur organisasi dalam mengelola kebijakan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilihan umum sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan.

Sistem pemilu di Indonesia tidak terlepas dari fungsi rekrutmen dalam sistem politik. Mengenai sistem pemilu Norris menjelaskan bahwa rekrutmen seorang kandidat oleh partai politik bergantung pada sistem pemilu yang berkembang di suatu negara. Di Indonesia, pemilihan legislatif (DPR, DPRD I, dan DPRD II) menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Lewat sistem semacam ini, partai-partai politik cenderung mencari kandidat yang populer sehingga punya elektabilitas yang tinggi di mata para pemilih. Daftar terbuka memungkinkan seorang kandidat mendapat contengan lebih banyak ketimbang calon lainnya dalam partai yang sama. Bagi partai politik,

populernya seorang caleg membuat pilihan pemilih terfokus kepada partainya ketimbang kepada partai-partai politik lain.

Indonesia telah menyelenggarakan 10 kali pemilihan umum. Khususnya untuk pemilihan anggota parlemen (baik pusat maupun daerah) digunakan jenis Proporsional, yang kadang berbeda dari satu pemilu ke pemilu lain. Perbedaan ini akibat sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti jumlah penduduk, jumlah partai politik, trend kepentingan partai saat itu, dan juga jenis sistem politik yang tengah berlangsung.

Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintah demokratis.

Sistem Proporsional (satu dapil memilih beberapa wakil) Sistem yang melihat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih. Sistem ini juga dinamakan perwakilan berimbang ataupun multi member constituency. ada dua jenis sistem di dalam sistem proporsional, yaitu ;

1. list proportional representation: disini partai-partai peserta pemilu menunjukan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai. alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada.

2. the single transferable vote : para pemilih di beri otoritas untuk menentukan preferensinya. pemenangnya didasarkan atas penggunaan kota.

Di Indonesia, pemilihan legislatif (DPR, DPRD I, dan DPRD II) menggunakan sistem proporsional adapun kelemahan dan kelebihanannya

#### 1. Kelebihan Sistem Proporsional

- a. Dipandang lebih mewakili suara rakyat sebab perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen.
- b. Setiap suara dihitung & tidak ada yang terbuang, hingga partai kecil & minoritas memiliki kesempatan untuk mengirimkan wakilnya di parlemen. Hal ini sangat mewakili masyarakat majemuk (pluralis).

#### 2. Kelemahan Sistem Proporsional

- a. Sistem proporsional tidak begitu mendukung integrasi partai politik. Jumlah partai yang terus bertambah menghalangi integrasi partai.
- b. Wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya, tapi lebih dekat dengan partainya. Hal ini memberikan kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen.
- c. Banyaknya partai yang bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi partai mayoritas.

## 5. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Azis Wahab Cholisin, (2011:18) menyatakan bahwa PKn ialah media pengajaran yang meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, program PKn memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut. Berbeda dengan pendapat di atas pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai penyiapan generasi muda (siswa) untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya (Samsuri, 2011: 28)

Menurut Bakry (2010: 3) pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta berjiwa demokratis yang berkeadaban. Dengan tujuan demikian ini, pendidikan kewarganegaraan banyak dasarnya ada yang berdasarkan filsafati, berdasarkan sejarah, berdasarkan sosial budaya.

Somantri (2001:299) mengemukakan “pendidikan kewarganegaraan yang cocok dengan Indonesia adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia, dan program PKn salah satu memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum negara, serta teori umum yang lain.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan menurut Muchji, Achmad (2007: 9) , adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, sertaketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.

Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap

mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai perilaku yang:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masnyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Rasional, dinamis, dan sabar akan hak dan kewajiban warga negara.
4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

Melalui pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Republik indonesia diharapkan mampu “memahami”, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang di hadapi oleh masyarakat , bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan tujuan nasional seperti yang di gariskan dalam pembukaan UUD 1945.

#### **a. Wilayah Kajian Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan**

Kajian penelitian ini berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban warga negara bagaimana seharusnya mereka berpartisipasi memecahkan masalah sosial dan politik yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menumbuhkan sikap-sikap politik terhadap sikap-sikap positif dalam hasil-hasil pembangunan nasional dan memiliki pengetahuan dan keterampilan negara. Jati diri kewarganegaraan.

## **B. Penelitian yang Relevan**

### **1. Tingkat Lokal**

Ditingkat lokal penelitian ini relevan dengan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Yongki Sapito mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung. Adapun judul penelitiannya adalah “Faktor-Yaktor Yang Mempengaruhi Perilaku memilih Masyarakat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji 2011”.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode Kuantitatif dengan tipe deskriptif. yang terdiri dari dua variabel yaitu, variabel bebas (X): Bupati dan Wakil Bupati dan variabel terikat (Y): Perilaku memilih Masyarakat. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Yongki Sapito adalah bahwa ada Faktor-Yaktor Yang Mempengaruhi Perilaku memilih Masyarakat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji 2011”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor *familiarity* atau keakraban memiliki nilai terbesar , faktor ini merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling besar dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat.

### **2. Tingkat Nasional**

- a. Ditingkat nasional penelitian ini relevan dengan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Alqoumi Anshar Anwari Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. Adapun judul penelitiannya ” Pengaruh Tingkat Identifikasi Partai dan Citra Kandidat Terhadap Perilaku Memilih Dalam Pilgub

Jateng 3013 (Studi Persepsi Masyarakat di Kelurahan Bringin Semarang”.

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. yang terdiri dari dua variabel yaitu, variabel bebas (X): pengaruh tingkat identifikasi partai dan citra kandidat dan variabel terikat (Y): perilaku memilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara citra kandidat terhadap perilaku memilih. Kedua, tidak ada pengaruh yang signifikan antara identifikasi partai terhadap perilaku memilih Ketiga, tidak ada pengaruh yang signifikan antara tingkat identifikasi partai dan citra kandidat secara simultan terhadap perilaku memilih.

- b. Penelitian lain, ditingkat nasional penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bungai Diwo, Astrid and Khairil , Buldani and Aji Budiman, Dwi, Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB. Adapun judul penelitiannya “Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Citra Kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pilkada Tahun 2010 di Provinsi Bengkulu (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)”

Dengan variabel faktor-faktor pembentuk citra meliputi identitas kandidat ( $X_1$ ), reputasi kandidat ( $X_2$ ), pengaruh yang dimiliki oleh kandidat ( $X_3$ ), harga yang ditawarkan oleh kandidat ( $X_4$ ), kualitas kandidat ( $X_5$ ), dan promosi yang dilakukan oleh kandidat ( $X_6$ ).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan melakukan analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan adanya hubungan faktor-faktor pembentuk citra kandidat calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada tahun 2010 di provinsi Bengkulu, dengan proses pembentukan citra kandidat.

Berdasarkan ketiga skripsi penelitian baik ditingkat lokal, nasional yang telah penulis baca dan uraikan di atas, maka penulis tertarik akan melakukan penelitian dengan menarik suatu variabel yang relevan dengan penelitian di atas. Adapun variabel yang akan penulis teliti yaitu, pengaruh kapabilitas partai ( $X_1$ ), citra kandidat ( $X_2$ ), sebagai variabel bebas ( $X$ ) dan sikap perilaku pemilih sebagai variabel terikat ( $Y$ ), dari ketiga variabel tersebut penulis ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan seperti ketiga penelitian di atas terkait kapabilitas partai politik dan citra kandidat terhadap sikap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Keunikan mengenai kelebihan dari variabel yang saya tentukan untuk diteliti, bahwa kapabilitas partai politik dan citra kandidat dalam sikap perilaku pemilih merupakan sebuah penentu terhadap penentuan sikap pemilih dalam menentukan pilihannya dilihat dari kapabilitas partai politik dan citra kandidat dalam pemilu legislatif.

### C. Kerangka Pikir

Pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 yang lalu membuat para calon anggota legislatif kian genjar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kapabilitas partai politik dan citra kandidat dapat mempengaruhi sikap perilaku pemilih. Partai politik itu berkompetisi atau bersaing dengan sejumlah partai lainnya, terutama dalam aktifitas memenangkan pemilih umum yang berlangsung secara periodik. Setiap partai politik maupun kandidat partai memiliki kepentingan dalam memperoleh citra yang positif dari rakyat. Jika kapabilitas suatu partai politik tidak memiliki konsistensi dan integritas, maka citra yang terekam dan melekat dalam diri masyarakat dapat berubah dan bahkan bisa jadi menghilang.

1. Pengaruh kapabilitas partai politik terhadap sikap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014.

Dimana kapabilitas partai politik menjadi salah satu penentu sikap perilaku pemilih yang dilihat dari indikator kapabilitas partai politik dari sosok pemimpin, komunikasi dalam sosialisasi politik, dan kemampuan dalam mengelola partainya, dari ketiga indikator tersebut memengaruhi sikap perilaku pemilih dalam menjatuhkan pilihan politiknya.

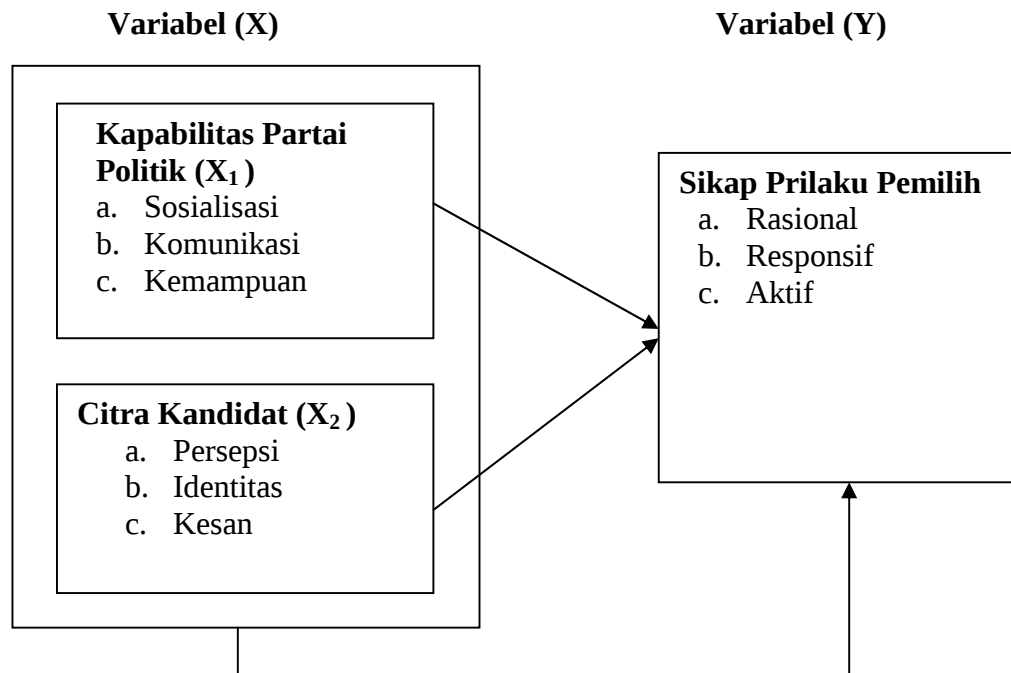
2. Pengaruh citra kandidat terhadap sikap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif di Desa Margodadi. Dimana setiap kandidat memiliki kepentingan dalam memperoleh citra yang positif dari rakyat. Citra

kandidat dilihat dari profil atau kepribadian baik buruknya kandidat menjadi faktor yang memengaruhi sikap perilaku pemilih dalam menjatuhkan pilihan politiknya, yang dilihat dari indikator berupa persepsi masyarakat, pesan, maupun identitas kandidatnya.

3. Pengaruh kapabilitas partai politik dan citra kandidat terhadap sikap perilaku pemilih, untuk menjatuhkan pilihan politiknya dilihat dari peran seorang pemimpin dan peran serta anggota-anggotanya maupun kandidat yang mencalonkan, menjadi pengaruh penting karena dapat memberikan gambaran dan petunjuk singkat tentang kapabilitas maupun kualitas partainya. Serta citra kandidat yang dilihat dari profil atau kepribadian baik buruknya kandidat menjadi faktor yang memengaruhi sikap perilaku pemilih. Perilaku pemilih itu sendiri mempunyai indikator dalam memberikan suaranya pada pemilihan umum, yang bersifat rasional, teaktif, responsif dan aktif.

Berdasarkan uraian, maka untuk mengetahui gambaran dalam penelitian ini, akan disajikan dalam skematik sebagai berikut :

**Gambar 2.1. Bagan kerangka berpikir**



#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan teori dan kerangka pikir di atas, maka dalam penelitian ini hipotesis penelitian ditetapkan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh kapabilitas partai politik terhadap sikap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014
2. Terdapat pengaruh citra kandidat terhadap sikap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014

3. Terdapat pengaruh kapabilitas partai politik dan citra kandidat terhadap sikap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014